

Pemkab Palas Torehkan Prestasi Opini WTP



Sumber Gambar: <https://analisdaily.com/>

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas), akhirnya berhasil menorehkan prestasi di bidang peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah, dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP ini terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.

Perolehan opini WTP tahun ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydun Oktain Panjaitan kepada Bupati Padang Lawas H Ali Sutan Harahap di Medan. Perolehan WTP juga adalah pertama kali didapatkan Pemkab Palas pasca daerah ini ditetapkan menjadi otonomi baru 13 tahun yang lalu.

Opini tertinggi dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu mampu diraih setelah 2016, 2017 dan 2018, hanya mampu menggondol opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), peringkat kedua dalam audit BPK Perwakilan Sumatera Utara. Pencapaian WTP atas LKPD Tahun 2019, telah menjadi target sebelumnya. Sebab, Pemkab Palas mempersiapkan segala bentuk kekurangan dan kelemahan dalam penilaian LKPD tahun sebelumnya.

Keberhasilan Pemkab Palas mendapatkan penilaian bergengsi ini, tidak terlepas dari peran serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di bawah kepemimpinan H Ali Sutan Harahap (TSO) dan H Ahmad Zarnawi Pasaribu. Raihan opini WTP kali ini telah mencerminkan betapa laporan keuangan Pemerintah Padanglawas telah memenuhi standar kualitas terbaik.

Prestasi yang ditorehkan saat ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Padanglawas untuk menata kelola keuangan daerah ini lebih baik.

Progres predikat opini WTP hari ini, tidaklah datang begitu saja. Prestasi ini adalah bukti nyata betapa Pemkab Padanglawas terus berbenah untuk melakukan perbaikan dalam membuat laporan penggunaan anggaran keuangan. Termasuk penyelamatan dan pengelolaan asset daerah bahagian penting yang tidak terpisahkan dari item pemeriksaan LKPD. Torehan prestasi yang diraih Pemkab Palas ini, mesti dijadikan sebagai spirit dalam merancang dan mengelola keuangan daerah yang terus dipacu untuk lebih baik lagi.

Terlebih sebelumnya Pemkab Palas hanya mampu meraih status WDP. Keberhasilan meraih opini WTP, harus dilihat sebagai langkah maju sekaligus sebagai modal kuat dalam bentuk pengelolaan anggaran keuangan dan asset daerah lebih transparan dan akuntabel. Sekadar kilas balik, jika diperhatikan grafik penanganan dan pengelolaan keuangan dan asset Pemkab Palas terus mengalami progres dan kemajuan yang cukup signifikan. Terutama masalah pendataan dan penataan asset daerah serta penanganan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Katakanlah seperti aset Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) yang sebelum pemekaran berada di wilayah Palas, kini semuanya sudah menjadi aset tetap milik Pemkab Palas. Peralihan aset Tapsel menjadi asset Palas tercantum dalam satu kesepakatan bersama diandatangani masing-masing dua kepala daerah belum lama ini. "Semua aset Tapsel yang berada di Padang Lawas sudah menjadi milik Pemkab Palas. Baik asset yang bergerak maupun yang tidak bergerak semuanya sudah *clear*," kata Trianta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Padanglawas. Dari data yang ada, terdapat sejumlah asset bergerak dan tidak bergerak yang kini telah beralih menjadi aset Pemkab Palas. Seperti kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Kemudian, ada juga aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.

Bukan itu saja, masih banyak yang diserahkan, namun tidak ditemukan dokumennya. Seperti tanah dan bangunan sekolah. Untuk objek yang tidak ada dokumen kepemilikannya, juga turut diserahkan, dan menjadi kewenangan Pemkab Palas untuk menerbitkan dokumennya. "Ada satu klausul yang dibuat, terkait material aset yang tidak ada dokumennya atau sudah hilang. Itu tindak lanjutnya diberikan kepada Pemkab Palas, yang kewenangan-nya menjadi kewenangan Pemkab Palas membuat dokumennya," kata Trianta.

Dengan begitu, persoalan peralihan aset dengan Pemkab Tapsel sebagai kabupaten induk sudah *clear*. Trianta berharap ke depan opini WTP bisa terus dipertahankan.

Bercermin dari kondisi capaian laporan keuangan yang diperoleh Pemerintah Daerah Palas tahun ini, kiranya bisa dijadikan sebagai pijakan sekaligus modal kuat untuk bisa terus mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan status opini WTP Tahun 2019, adalah waktu yang cukup untuk memetik pengalaman. Bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah sebelumnya. Kekurangan-kekurangan yang setiap tahunnya senantiasa terus dibenahi, dianalisis, dan dievaluasi membuat daerah ini semakin matang dalam pengelolaan anggaran keuangannya.

Upaya perbaikan seiring begitu kuatnya keinginan Pemkab Palas untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara sistematis, serta adanya *political will* Bupati H Ali Sutan Harahap (TSO) - H Ahmad Zarnawi Pasaribu, akhirnya berbalas manis. Perolehan opini WTP yang menjadi impian semua pemerintah daerah itu, bukanlah hal mudah untuk meraihnya. Pemkab Palas sejak awal telah merancang secara sistematis tahapan-tahapan untuk mencapai opini WTP. Bahkan jauh sebelumnya, Pemkab Palas telah menanamkan komitmen sebagai nafas dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah untuk terus diperbaiki. Bahkan Bupati Palas yang akrab dipanggil Tongku Sutan Oloan (TSO) itu selaku kepala daerah, telah melakukan kontrak kinerja dengan para pejabat teknis atau pengelola anggaran secara langsung untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mengelola asset dan anggaran secara akuntabel dan transparan.

Dengan adanya kontrak kinerja seluruh pengelola anggaran memiliki tanggungjawab penuh dalam menata kelola keuangan dan assetnya dengan baik. Seiring dengan kontrak kinerja yang dibangun, slogan menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun terus digelorakan TSO sebagai bagian dari strategi untuk mencapai opini WTP.

Gema slogan menuju Wajar Tanpa Pengecualian yang telah ditanamkan, seakan menjadi magnet dan energi positif bagi seluruh satuan tugas. Bukan saja bagi Pemerintah Daerah, namun juga bagi masyarakat Padanglawas.

Seperti kata pepatah, 'Pengalaman adalah guru paling berharga'. Perolehan opini WTP tahun sebelumnya menjadi pijakan bagi Pemkab Palas untuk bisa menembus opini WTP tahun ini. Tidak jarang, optimisme dan pesimisme pun bercampur aduk untuk mampu menembus impian yang telah ditargetkan pemerintah daerah beberapa tahun terakhir.

Disamping tidak kalah pentingnya bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kesadaran dan tanggungjawab para OPD untuk menata usahakan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Termasuk didalamnya bagaimana meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) bagi seluruh SKPD. Sebab Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sehingga, segenap pikiran, tenaga dan waktu pun dicurahkan disamping mencari inovasi-inovasi baru guna menggapai target yang diinginkan. Sumbangsih pikiran sekecil apapun direspon secara cepat untuk perbaikan Termasuk dukungan penuh DPRD Kabupaten Palas yang selama ini cukup harmonis membangun komunikasi konstruktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah ini.

Bupati Palas H Ali Sutan Harahap (TSO) selaku kepala daerah selalu menekankan kepada seluruh aparatur di jajaran Pemkab Palas, untuk terus melakukan perbaikan kinerja, baik persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan dan aset. Sehingga perolehan predikat pengelolaan keuangan diharapkan bukan hanya pada tingkat WDP, tapi bagaimana target perolehan opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Palas bisa tercapai.

Bupati mengungkapkan, selama ada koordinasi dan komitmen yang kuat di antara jajaran SKPD untuk bekerja lebih serius dalam menata kelola keuangan, capaian predikat opini WTP bukanlah hal yang mustahil.

Namun untuk mencapai itu semua tambah TSO, selain dibutuhkan kerja keras dan koordinasi yang baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga dibutuhkan komitmen dan rasa tanggungjawab penuh untuk mengelola keuangan dengan baik. "Selama ada keseriusan dan usaha, Insya Allah apa yang kita targetkan bisa kita capai," papar TSO.

Bupati juga menambahkan, perolehan opini WTP perdana ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak selama ini. Untuk itu ia meminta, perolehan WTP harus menjadi tolok ukur yang memberikan motivasi besar untuk terus ditingkatkan dalam mempertahankan opini WTP. "Saya ingin perolehan opini WTP ini adalah murni dari hasil kerja keras, sehingga kita tahu bagaimana

mengelola keuangan itu dengan baik dan benar. Karena kegunaannya juga adalah untuk kepentingan daerah," paparnya.

Sekretaris Daerah Padang Lawas Arpan Nasution mengungkapkan, sejalan dengan perkembangan daerah yang terus berbenah dari berbagai sektor, perlu didorong guna peningkatan kemajuan, bukan saja dari segi tertib administrasi serta pola sistem kerja yang bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Tetapi yang terpenting lagi bagaimana tingkat kepatuhan terhadap peraturan dalam mengelola anggaran yang akuntabel dan transparan bisa terus ditingkatkan.

Mulai dari pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD), dan seluruh elemen lapisan masyarakat yang memberikan dukungan kepada program pemerintah secara bersama, harus sejalan dalam melihat urgensi penataan dan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, tepat sasaran dan tepat guna. "Hal ini sejalan dengan komitmen Bupati Palas H Ali Sutan Harahap, untuk terus melakukan perbaikan dalam menata kelola keuangan dan asset daerah ini," jelas Arpan. Arpan berharap, komitmen dan kerja sama yang sudah terbangun selama ini, harus lebih ditingkatkan lagi. Sehingga kendala dan kelemahan yang dihadapi bisa terus diatasi dengan baik.

Menurut Sekda, predikat opini WTP merupakan sebuah prestasi dan kerja keras dari semua tim dan jajaran Pemkab Palas serta dukungan dari DPRD. Arpan berharap, dengan hasil yang didapat Pemkab Palas ini, kiranya bisa terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan transparansi keuangan dalam pelayanan publik dengan melaksanakan APBD sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku di masa mendatang.

Sekda juga mengingatkan, agar jajaran Pemkab Palas dapat mempertahankan predikat WTP. Karena meraih prestasi meski sulit dan butuh kerja keras, namun jauh lebih sulit mempertahankan prestasi. Untuk itu pinta Arpan, jangan lengah dan terbuai, mari terus bekerja keras untuk pembangunan, sehingga Kabupaten Palas dapat mewujudkan Kabupaten Palas beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (Bercahaya).

Sedangkan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Trianta mengatakan, perolehan predikat opini WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun ini, tidak terlepas berkat kerjasama dan peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD yang terus melakukan fungsi pengawasan. "Perolehan opini WTP tahun ini, adalah bagian dari kerjasama seluruh tim dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," kata Trianta.

Begitu juga dengan Ketua DPRD Padang Lawas Amran Pikal Siregar, juga mengapresiasi perolehan opini WTP tahun ini. Amran berharap agar seluruh jajaran Pemkab Palas, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan, namun tetap lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan dalam menjalankan setiap program daerah.

Disamping itu, perlu adanya peningkatan sinkronisasi, pengawasan serta kerjasama yang lebih solid antar OPD ke depan, sehingga Pemkab Palas mampu memberikan yang terbaik bagi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasca perolehan opini WTP, muncul tantangan baru. Tantangan bagaimana opini WTP dapat terus dipertahankan dan tidak lepas dari genggamannya sebagai kebanggaan masyarakat Padanglawas. Tantangan ke depan bagaimana komitmen Pemkab Palas tidak berjalan hanya sesaat. Tantangan bagaimana menjadikan opini WTP sebagai identitas pemerintah daerah dan masyarakat Padanglawas. Terasa berat memang kedengarannya, tapi mau tidak mau tantangan itu harus dihadapi dan diatasi. Sebab mempertahankan sesuatu lebih berat daripada meraihnya. Satu hal yang perlu ditanamkan lagi, adalah, bagaimana slogan selamanya “Wajar Tanpa Pengecualian” harus terus digaungkan Pemkab Palas untuk bisa mempertahankan opini WTP. Selamat atas torehan perestasi opini WTP, kiranya tahun berikutnya opini WTP tidak lepas dari genggamannya.

Sumber Berita:

1. <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/06/08/1006730/pemkab-palas-torehkan-prestasi-opini-wtp/>, tanggal 8 Juni 2020.
2. <https://hariansib.com/Berita-Terkini/Pemkab-Palas-Raih-Opini-WTP-dari-BPK-Atas-Laporan-Kuangan-TA-2019>, tanggal 4 Juni 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1, 9 dan 11

1. *Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk*

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

9. *Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*

Pasal 16 ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 17 ayat (2)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 1 angka 1, 5 dan 6

1. *Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. *Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*
6. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 6 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*
- (2) *Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
- (3) *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Pasal 7 ayat (1)

- (1) *BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.*

Penjelasan

Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester.

Pasal 8 ayat (1)

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.